

ANALISIS KEBIJAKAN KELOMPOK TANI MENUJU PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S) DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERTANIAN DI SEMARANG – PPMKP CIAWI

Fadia Hanum Fristiannisa

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian

fristiannisadea@gmail.com, fristiannisa_dea@yahoo.co.id

ABSTRACT

Agriculture is an important sector for developing a country to fulfill food needs, the agricultural sector is also a sector that absorbs a lot of labor. In its journey, farmers as the main actors are a source of knowledge and experience that can be utilized to develop agriculture in Indonesia in particular. It is time for a farmer to study with farmers so that there is an ease in transferring knowledge. However, with the development of the era of work as a farmer is not interesting to be cultivated, so the need for the support of relevant agencies and farmers who are members of farmer groups to be able to increase "the love" of the millennials generation and convince the millennial that farming is a business that can be calculated. It takes creativity from the heads of farmer groups to be able to attract the interest of the wider community, which is supported by the sophistication of agricultural technology, expertise, and knowledge that can be realized in a training activity for millennials to want to grow crops and become a training center (P4S). Full support must also be provided through the Regional Government and the Central Government in this case the Ministry of Agriculture which is the executor to be able to develop agricultural resources, especially in Semarang, Central Java.

Keywords: Millennials Generation, Training Center, Agricultural Resources

I. PENDAHULUAN

Negara Agraris adalah julukan yang tepat diberikan untuk Negara Indonesia, hamparan tanah lapang yang masih difungsikan sebagai persawahan dan ditambah lagi sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pecaharian sebagai petani. Tidak dipungkiri bahwa pada saat ini terdapat sedikit pergeseran paradigma mengenai petani, disamping sulitnya meregenerasi petani, alih fungsi lahan secara besar-besaran pun terjadi di Indonesia membuat petani semakin termajinalisasikan. Kaum muda seakan enggan memiliki cita-cita sebagai petani, jangankan cita-cita, harapan menjadi seorang petani sebagai pekerjaan muliapun tak pernah terpikirkan dibenak para kaum milenial. Hal ini yang membuat Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus menerus

membuat kebijakan untuk dapat mempertahankan keberadaan petani terutama meningkatkan keberadaan petani milenial melalui berbagai cara, mulai dari pembinaan Kelompok Tani berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.

Berdasarkan Permentan tersebut, pembinaan Kelompok Tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya, dengan menumbuh kembangkan kerja sama antar petani dan pihak lainnya yang terkait untuk mengembangkan usahatani. Selain itu pengembangan Kelompok Tani diarahkan pada peningkatan kemampuan setiap Kelompok Tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan Kelompok Tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri serta Kelompok Tani yang berkembang bergabung ke dalam Gabungan Kelompok Tani disebut GAPOKTAN. Akhir dalam pembinaan ini adalah bagaimana penggabungan Kelompok Tani ke dalam GAPOKTAN dilakukan agar Kelompok Tani dapat lebih berdaya dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani ke sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerja sama dalam peningkatan posisi tawar. Penyempurnaan dalam pembinaan Kelompok Tani terus diupayakan hingga terbentuk suatu model pembinaan yang tepat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 33/Permentan/SM.230/7/2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya. Pada hakikatnya Permentan ini mulai mengakomodir kebijakan dimana sudah saatnya petani belajar dari petani melalui model permagangan yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana pelatihan, sehingga mampu menjadi mitra kerja pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian.

Melalui Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dilaksanakan khususnya di daerah Jawa Tengah dengan menasar Kelompok Tani atau GAPOKTAN yang berpotensi untuk dijadikan sebagai Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) sesuai mandat Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 33/Permentan/SM.230/7/2016. Tentu saja pada akhirnya P4S ini bisa dijadikan model untuk tempat pelatihan permagangan sehingga meningkatkan minat Kelompok Tani maupun GAPOKTAN untuk berlomba-lomba menjadi P4S dan dapat menarik generasi milenial sebagai bentuk upaya dalam kaderisasi

petani di Indonesia melalui P4S sehingga melahirkan pengusaha dibidang pertanian milenial dan dalam rangka pengembangan SDM Pertanian. Namun, pembinaan tersebut bukanlah hal yang mudah mengingat Kelompok Tani maupun GAPOKTAN belum mengetahui apa itu P4S. Sehingga dalam proses perjalanannya benar-benar membutuhkan bimbingan dan binaan dari instansi pembina, dalam hal ini adalah PPMKP.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan muncul beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam proses pembinaan dari Kelompok Tani atau GAPOKTAN menjadi P4S antara lain:

1. Seberapa jauh kesiapan Kelompok Tani atau GAPOKTAN menjadi percontohan P4S?
2. Bagaimana kesiapan fasilitator dan kepengurusan Kelompok Tani atau GAPOKTAN untuk menjadi P4S?
3. Bagaimana Kelompok Tani atau GAPOKTAN tersebut ikut serta dalam pengembangan SDM Pertanian?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentunya dibutuhkan penelitian lebih lanjut oleh sebab itu penulis mengambil judul **“Analisis Kebijakan Kelompok Tani Menuju Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) dalam Pengembangan Sumber Daya Pertanian di Semarang”**.

II. METODE PENELITIAN DAN TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena meneliti kondisi yang alamiah tanpa adanya manipulasi untuk mendeskripsikan serta menganalisis peristiwa. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa seluruh Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Peneliti menggunakan data berupa teks yaitu data yang diperoleh dari sumbernya langsung yaitu Kelompok Tani atau GAPOKTAN Calon P4S di Semarang terutama Ketua masing-masing beserta Dinas Pertanian Terkait.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan responden terpilih, menggunakan metode *purposive sampling* serta melalui observasi. Data sekunder terdiri atas berbagai dokumen yang terkait dengan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu dengan pedoman observasi, pedoman dokumentasi, dan pedoman wawancara. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi yang digunakan untuk menjelaskan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber.

Pembinaan Kelompok Tani atau GAPOKTAN yang akan dibina oleh Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) menjadi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 33/Permentan/SM.230/7/2016 harus memiliki beberapa persyaratan mutlak sehingga dapat dikatakan sebagai P4S, berikut akan disajikan dalam tabel terkait prinsip, ciri dan peran kelembagaan pelatihan pertanian swadaya:

Tabel 1. Prinsip, Ciri Dan Peran Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

No	Prinsip	Ciri	Peran
1	Keswadayaan	Memiliki keunggulan dalam melakukan Usaha Tani perdesaan dan kesukarelaan berbagi pengetahuan, teknologi dan keterampilan kepada Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha lain yang ditumbuhkembangkan oleh Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang	Lembaga penyelenggara pelatihan dan permagangan untuk Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha lain
2	Keterpaduan	Mempunyai lahan Usaha Tani dan/atau kegiatan agribisnis perdesaan yang layak dipelajari, dicontoh, ditiru oleh Pelaku Utama dan/ atau Pelaku Usaha lain	Lembaga yang turut andil dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan Pelaku Utama dan/ atau Pelaku Usaha lain
3	Kemitraan	Melayani masyarakat untuk kegiatan berlatih, magang, berkonsultasi dan/atau kunjungan/studi banding	Lembaga yang turut menumbuhkan, mengembangkan dan memperkuat kader tani
4	Kemanfaatan	Berada di lingkungan Usaha Tani atau perdesaan yang mendukung proses belajar mengajar untuk peserta;	Sentra dalam pengembangan dan diseminasi teknologi/ inovasi, budidaya, perbenihan, pengolahan hasil, pengembangan spesifik lokalita

5	Keberlanjutan	Memiliki instruktur/pelatih, fasilitator lainnya yang professional	Sentra pengembangan jejaring Usaha Tani
---	---------------	--	---

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 33/Permentan/SM.230/7/2016

Adapun dalam pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya merupakan seluruh rangkaian dalam rangka memperkuat kelembagaan pelatihan pertanian swadaya melalui kegiatan apresiasi, sosialisasi, fasilitasi, pendampingan kelembagaan, pelatihan/ permagangan, pengkaderan, penyuluhan, pengembangan teknologi tepat guna dan promosi. Sebagai Kelompok Tani atau GAPOKTAN yang sebelumnya belum menjadi P4S, maka bagi instansi pembina wajib memberikan klasifikasi terhadap setiap Kelompok Tani atau GAPOKTAN. Berdasarkan Permentan RI Nomor. 33/Permentan/SM.230/7/2016 Klasifikasi Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya didasarkan pada pelaksanaan peran Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya, dalam ruang lingkup penumbuhkembangan kader tani di perdesaan, penyelenggaraan pelatihan/ permagangan bagi Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha dan penyuluhan swadaya, terbagi menjadi empat, yaitu:

a. Kelas Pratama

- 1) Memiliki potensi untuk menyelenggarakan pelatihan/ permagangan ditinjau dari sarana prasarana dan teknologi yang tersedia;
- 2) Telah melakukan kegiatan permagangan swadaya Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha, siswa sekolah dan mahasiswa;
- 3) Keunggulan Usaha Tani yang dikembangkan mempunyai dampak dalam pengembangan ekonomi lokal disekitarnya;
- 4) Memiliki kemauan kuat untuk mencari, menemukan, merekayasa cara-cara berusahatani yang lebih baik dan mentransfer teknologi yang dikembangkan;
- 5) Dikenal oleh masyarakat sekitarnya dan tercatat oleh lembaga yang menangani penyuluhan; dan
- 6) Sumber daya manusia pengelola telah mengikuti diklat atau memiliki kompetensi pengelolaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya (berkaitan dengan administrasi, organisasi dan manajemen).

b. Kelas Madya

Kelas Madya memiliki kriteria baku/standar sebagai berikut:

- 1) Memenuhi seluruh standar Kelas Pratama;

- 2) Telah menyelenggarakan diklat terstruktur (merencanakan diklat, menyiapkan materi diklat, melaksanakan, mengevaluasi dan bimbingan lanjutan);
- 3) Telah melaksanakan upaya menumbuhkembangkan kader-kader tani disekitarnya;
- 4) Telah mengikuti Diklat Metodologi Penyuluhan Pertanian;
- 5) Telah mengikuti Diklat Manajemen Permagangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya; dan
- 6) Telah mengikuti Diklat Instruktur Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya.

c. Kelas Utama

Kelas Utama memiliki kriteria baku/standar sebagai berikut:

- 1) Memenuhi seluruh standar Kelas Pratama dan Madya;
- 2) Telah menyelenggarakan pelatihan/permagangan secara mandiri;
- 3) Telah melaksanakan penyuluhan swadaya secara mandiri; dan
- 4) Telah mengakses sumber teknologi dan pendanaan secara mandiri.

d. Kelas Aditama

Kelas Aditama memiliki kriteria baku/standar sebagai berikut:

- 1) Memenuhi seluruh standar Kelas Pratama, Madya dan Utama;
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pelatihan/permagangan dan pendampingan secara mandiri;
- 3) Mewujudkan produk kreasi dan inovasi (krenova);
- 4) Mewujudkan jejaring kerjasama dalam bidang pengembangan teknologi; dan
- 5) Menciptakan pasar.

Pada dasarnya dalam menentukan suatu Kelompok Tani maupun GAPOKTAN menjadi P4S haruslah melalui klasifikasi yang harus dilaksanakan oleh instansi pembina yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pertanian, klasifikasi berguna untuk verifikasi serta kelayakan, kesiapan dari Kelompok Tani maupun GAPOKTAN tersebut menjadi P4S sebagai tempat permagangan bagi insan pertanian. Maka berdasar Permentan Nomor. 33/Permentan/SM.230/7/2016, klasifikasi P4S berdasarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Komponen Penilaian Klasifikasi P4S

No	Komponen	Sub Komponen
1.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Lahan Usaha Tani2. Ruang Belajar3. Sarana Belajar4. Ruang Sekretariat

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Sarana Kesekretariat 6. Peralatan Pertanian 7. Ruang Perpustakaan 8. Asrama 9. Sarana MCK 10. Penerangan 11. Akses Ke Jalan
2	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi 2. Uraian Tugas Pengurus 3. AD/ART
3	Penyelenggaraan Pelatihan/ Permagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi 2. Frekuensi dan Intensitas 3. Pembinaan
4	Ketenagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator 2. Kompetensi Fasilitator 3. Tenaga Kepengurusan 4. Pengembangan Tenaga Kepengurusan 5. Pengakuan Pihak Luar
5	Pengembangan Usaha dan Jejaring Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Usaha 2. Jejaring Usaha 3. Jejaring Kerja Pelatihan/ Permagangan

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 33/Permentan/SM.230/7/2016

Klasifikasi yang dilakukan merupakan klasifikasi yang langsung dilakukan oleh Tim Pembina/ Tim Verifikasi yang diterjunkan langsung keberbagai daerah binaan PPMKP di Jawa Tengah, dan nantinya berdasarkan hasil klasifikasi akan muncul skor penilaian yang mana skor tersebut dijadikan patokan Kelompok Tani atau GAPOKTAN tersebut masuk ke dalam kategori P4S Kelas Pemula, Kelas Madya, Kelas Utama atau Kelas Aditama. Berikut tabel hasil penilaian kumulatif dari pengklasifikasian P4S:

Tabel 3. Nilai Kumulatif Skor Hasil Penilaian

No	Klasifikasi P4S	Nilai Kumulatif	
		Terendah	Tertinggi
1	Pemula	23.00	42.75
2	Madya	44.25	68.00
3	Utama	69.50	94.75
4	Aditama	96.25	100

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 33/Permentan/SM.230/7/2016

Analisis Kebijakan

Kebijaksanaan menurut berdasarkan James E. Anderson dalam A. Syamsu Alam (Jurnal Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial Di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif: 2009), adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu,

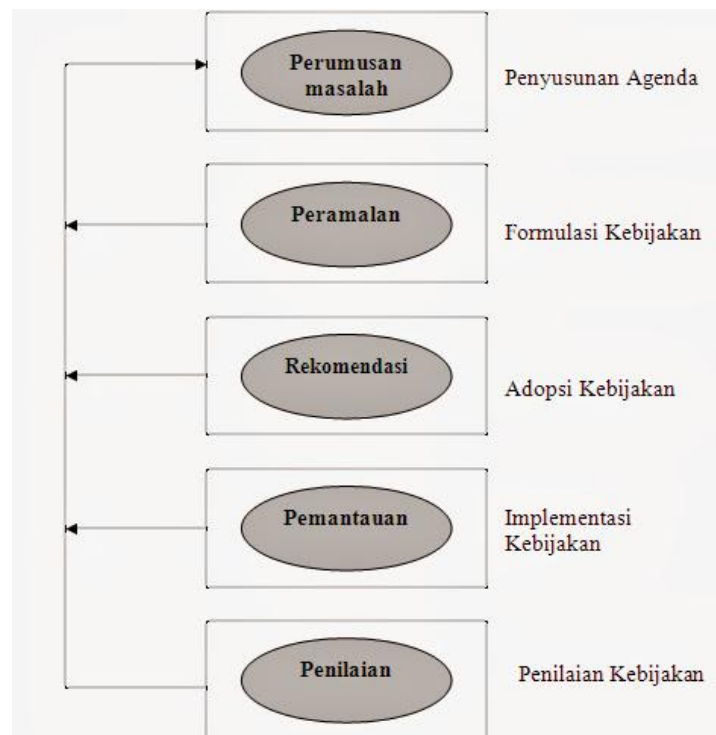
pemahaman ini terkait dengan Carl Friedrich, yang menyatakan bahwa kebijaksanaan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan kebijaksanaan menurut James E. Anderson (Solichin, 2003: 2), adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pemahaman ini terkait dengan Carl Friedrich (Budi, 2002: 16), yang menyatakan bahwa kebijaksanaan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan.

Pemikiran mengenai studi-studi kebijakan terutama yang berkaitan dengan analisis kebijakan publik, sudah lama dikenal dan memiliki berbagai macam pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar/ teoritis. Seorang analis kebijakan publik apabila dihadapkan pada permasalahan dan tantangan riil untuk menganalisis fenomena kebijaksanaan, secara implisit atau eksplisit tentu akan menggunakan strategi kebijakan tertentu yang dianggap paling sesuai dalam pemecahan masalah dan kebutuhan masing-masing.

Proses Analisis Kebijakan

William N. Dunn (2003: 22) menyebutkan bahwa proses analisis kebijakan merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis itu diterjemahkan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai berikut:

Gambar 1. Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan Dengan Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan

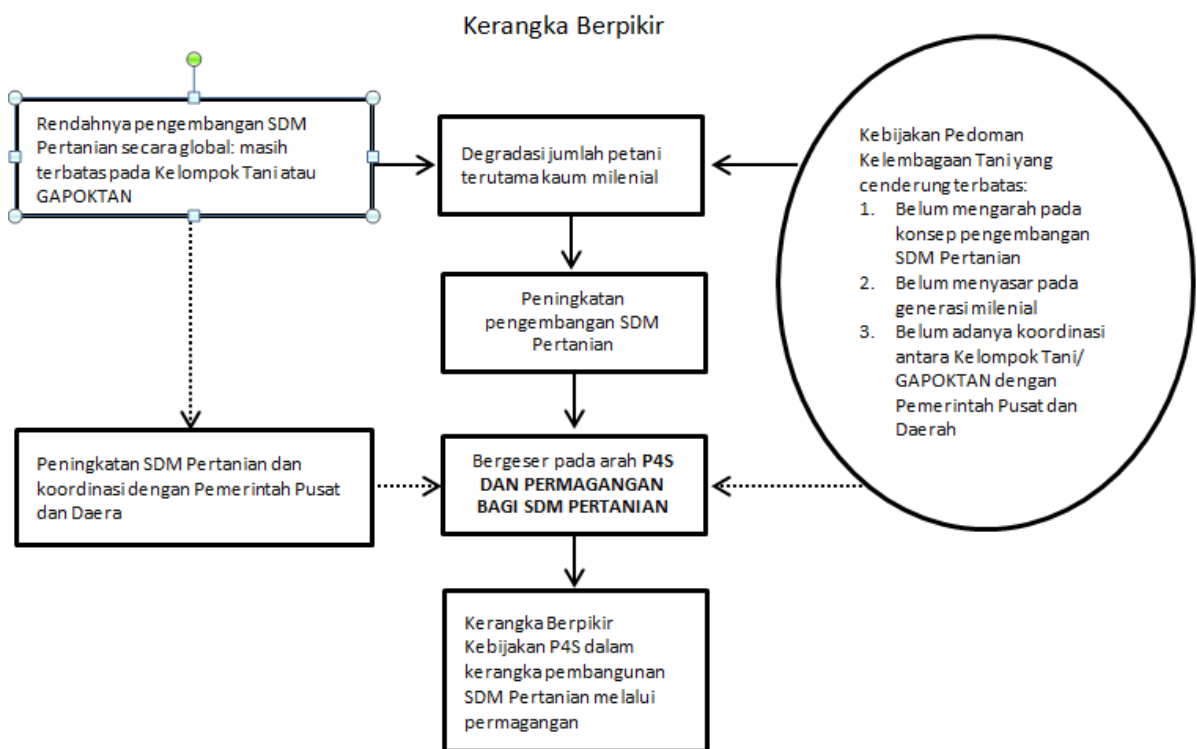


Berdasarkan Gambar 1 maka dengan melihat pola prosedur analisis kebijakan yaitu dapat dijelaskan seperti berikut ini:

1. Analisis terhadap suatu kebijakan, baik terhadap kebijakan yang ada maupun yang belum ada selalu dimulai dengan “Perumusan Masalah”, berdasarkan masalah yang tersebut kita dapat menilai dan menemukan asumsi-asumsi untuk pemecahan masalahnya.
2. Setelah masalah-masalah diinventarisir dan sesuai dengan masalah (masalah publik) dapat dilakukan dengan penyusunan agenda (agenda setting), dimana merumuskan prioritas masalah dan menentukan siapa saja yang akan diajak untuk membahas masalah kebijakan tersebut.
3. Peramalan mengkaji segala kemungkinan yang akan terjadi akibat suatu kebijakan jika diterapkan diterapkan
4. Berdasarkan pengkajian dengan menggunakan peramalan kebijakan maka segala kemungkinan yang dapat terjadi yang mengakibatkan apa saja yang akan terjadi, baik dampak sosial, dana, politik, dan klinis. Setelah tahap peramalan selesai mengkaji segala akibat dari suatu kebijakan maka kita membuat rekomendasi kebijakan dengan segala pertimbangan tersebut
5. Rekomendasi akan membuahkan pengetahuan yang relevan mengenai kebijakan yang akan diimplementasikan nantinya baik berkaitan dengan manfaat maupun biaya serta dapat memberikan alternatif serta membantu pengambilan keputusan kebijakan.

- 6. Setelah rekomendasi maka implementasi kebijakan dilakukan, pada tahap ini merupakan tahap sekaligus pemantauan (monitoring) terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.
- 7. Penilaian atau evaluasi akan memberikan masukan terhadap kebijakan yang diimplementasikan antara kinerja dan hasil yang didapatkan

Penjelasan dari Gambar 1, maka didapatkan serangkaian kerangka pemikiran yang akan digunakan untuk membahas penelitian ini. Kerangka berpikir tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pelaksanaan penelitian ini mengarah pada kesiapan Kelompok Tani/GAPOKTAN untuk menjadi P4S yang sepenuhnya menjadi tempat pelatihan bagi siapa saja ingin berkecimpung dalam dunia pertanian. Sehingga perlu diketahui sebelumnya, bahwa Kelompok Tani/GAPOKTAN ini merupakan lembaga yang telah berdiri cukup lama dan keberadaannya telah diketahui oleh Dinas terkait di masing-masing Kabupaten. Penelitian yang dilaksanakan pada P4S Jawa Tengah telah membuahkan hasil dimana dari hasil wawancara langsung kepada para Ketua P4S dan

pengamatan langsung diperoleh data-data yang menyatakan bahwa kesiapan Kelompok Tani atau GAPOKTAN telah siap menuju tempat pelatihan pertanian atau P4S dengan berbagai kesiapan termasuk sarana dan prasarana pelatihan. Sebagai bahan untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil sampel dua (2) lokasi yang akan menjadi bahan dalam penelitian jurnal ini, yaitu di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Berdasarkan data yang masuk dari Dinas terkait Kelompok Tani/ GAPOKTAN yang diajukan untuk menjadi P4S adalah sebagai berikut pada tabel :

Tabel 4. Wilayah Klasifikasi P4S

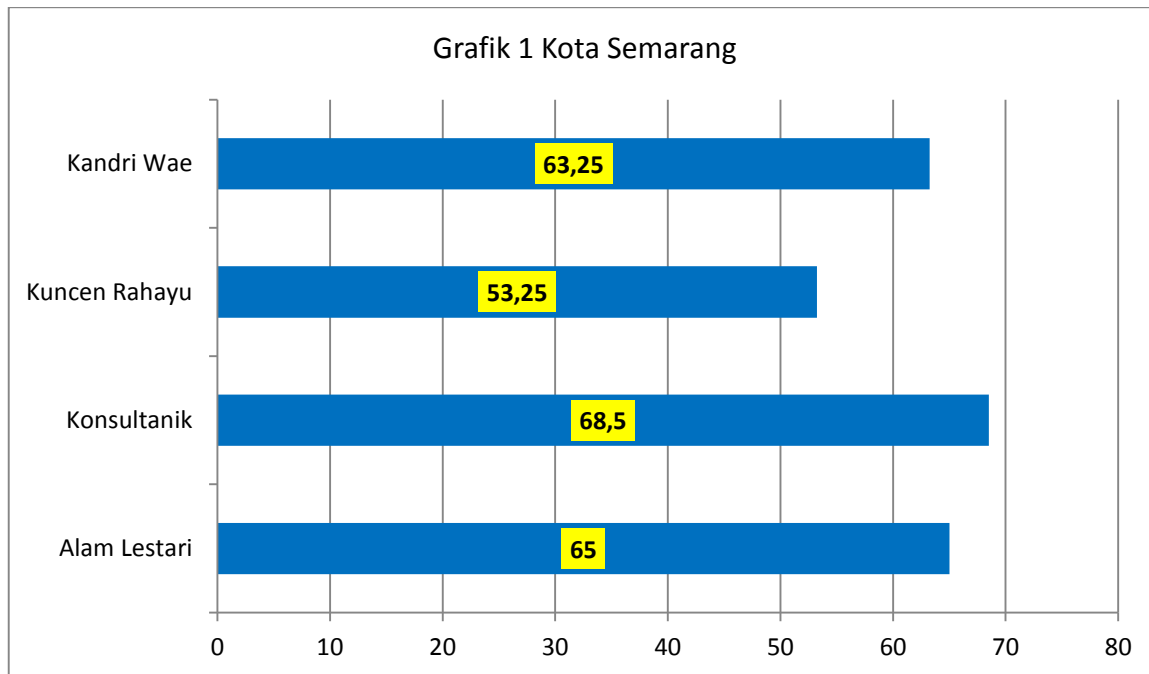
No	Wilayah	No	Nama Organisasi/ Kelompok Tani/ GAPOKTAN	Komoditas
A	Kota Semarang	1	Alam Lestari	Hortikultura
		2	Konsultanik	Padi Organik
		3	Kuncen Rahayu	Sapi Perah
		4	Kandri Wae	Jambu Kristal
B	Kabupaten Semarang	1	Sari Susu	Olahan Susu
		2	Gubug Anggur	Tanaman Anggur
		3	Al Barokah	Padi Organik
		4	Citra Muda	Sayuran Organik

Sumber: PPMKP – Kementerian Pertanian

Tabel 4 merupakan tabel wilayah pengklasifikasian calon P4S yang akan diverifikasi menggunakan instrumen yang telah disesuaikan dengan Permentan Nomor. 33/Permentan/SM.230/7/2016. Penelitian melibatkan Dinas Pertanian setempat, Penyuluh Kecamatan serta FK (Forum Komunikasi) sehingga dalam melakukan verifikasi ini akan terlihat keabsahannya. Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui setidaknya ada delapan (8) Kelompok Tani/GAPOKTAN yang akan diikutsertakan dalam penelitian guna sebagai tempat pelatihan atau permagangan bagi petani milenial atau pengusaha pertanian milenial. Dalam penelitian ini digunakan 5 komponen atau indikator yang dijadikan acuan dalam penilaian sekaligus verifikasi, diantaranya: sarana prasarana, kelembagaan, penyelenggaraan/pelatihan, ketenagaan serta pengembangan usaha dan jejaring kerja.

Verifikasi yang menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dalam Permentan juga merujuk pada kondisi dan fakta di lapangan yang dilihat, sehingga peran dari Dinas terkait dan Penyuluh sangat dibutuhkan keberadaannya dalam verifikasi. Dari verifikasi

ataupun penelitian, didapatkan hasil penilaian disajikan dalam grafik berbeda untuk wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang dalam Grafik 1 dan Grafik 2 sebagai berikut:



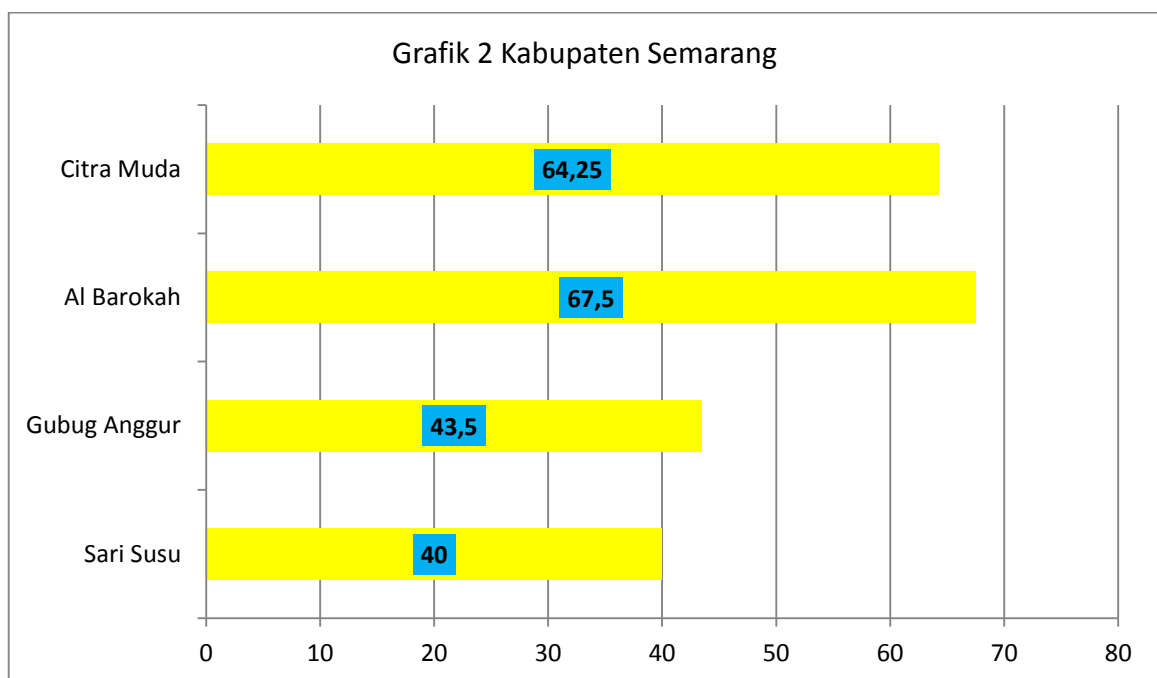
Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan Grafik 1 Kota Semarang maka dapat dilihat perolehan skor atau nilai yang didapat dari hasil penelitian yang telah diolah, maka dapat dikategorikan bahwa:

3.1. Kategori Kelompok Tani Kota Semarang dengan empat Kelompok Tani yang menjadi tempat kegiatan penelitian semuanya telah memenuhi standar kriteria sebagai P4S dimana seluruhnya menempati “Kelas Madya”, dapat dikatakan bahwa Kelompok Tani yang berada di wilayah Kota Semarang siap menjadi P4S dan menjadi tempat pemagangan bagi pengusaha pertanian untuk mewujudkan generasi petani milenial. Perlu diketahui bahwa Kelompok Tani yang ada di Kota Semarang ini telah dikembangkan sebagai salah satu destinasi tempat wisata untuk kategori “Agro Wisata” yang menyuguhkan hasil pertanian atau komoditas, sebagai tempat *outbound* dan telah dilengkapi dengan sarana prasarana selayaknya tempat wisata, pada dasarnya memang dunia pertanian dapat digabungkan dengan kegiatan wisata. Dengan adanya wisata agro, masyarakat umum dapat mengunjungi lokasi, mengetahui dan merasakan langsung pengalaman yang disuguhkan di tempat tersebut. Diketahui bahwa akhir tujuan pembentukan dari P4S adalah bagaimana organisasi ini mampu mencetak generasi milenial yang berbais pada sektor pertanian, dengan adanya

konsep agro wisata bagi keempat Kelompok Tani yang ada di Kota Semarang ini mendukung dijadikannya sebagai tempat pelatihan dan permagangan. Tidak hanya menjual komoditas, tetapi menyajikan dan menawarkan paket wisata kepada masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam proses pelatihan dan permagangan mereka juga dapat belajar dari sektor pariwisata dan bagaimana memasarkan produk-produk unggulan yang dihasilkan sehingga menciptakan generasi milenial yang disebut dengan “*Agro Entrepreneur*”.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan untuk kapasitas fasilitator yang dimiliki sangat memadai. Para Ketua Kelompok Tani merupakan para pakar dibidangnya masing-masing yang sering menjadi pembicara dalam segala kegiatan yang diadakan oleh dinas-dinas terkait.



Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan Grafik 2 Kabupaten Semarang maka dapat dilihat perolehan skor atau nilai yang didapat dari hasil penelitian yang telah diolah, maka dikategorikan bahwa:

- 3.2. Kategori Kelompok Tani Kabupaten Semarang dengan empat Kelompok Tani yang menjadi tempat kegiatan penelitian semuanya telah memenuhi standar kriteria sebagai P4S dimana untuk Kelompok Tani Sari Susu dan Gubug Anggur dikategorikan sebagai “Kelas Pemula”, sementara untuk Al Barokah dan Citra Muda dikategorikan sebagai “Kelas Madya” dengan skor yang diperoleh. Kelompok Tani Sari Susu

merupakan Kelompok Tani yang menghasilkan olahan susu dan berbasis pada UMKM, sementara untuk Gubug Anggur lebih kepada pembudiyaaan anggur yang sekaligus untuk membuktikan bahwa pengembangan anggur di Indonesia sangat besar potensinya. Namun dalam penelitian yang dilaksanakan terutama pada Gubug Anggur dan Sari Susu masih bersifat kunjungan (*study tour*) dan sarana prasarana belum cukup memadai sehingga kedua Kelompok Tani ini masih dikategorikan sebagai P4S “Kelas Pemula” sehingga masih diperlukan perbaikan dan penyempurnaan untuk menjadi “Kelas Madya”.

Secara garis besar berdasarkan pada grafik yang ditunjukkan pada wilayah Kabupaten Semarang, bahwa Kelompok Tani tersebut sangat siap menjadi P4S, terutama pada kesiapan tenaga pelatih yang mereka miliki masing-masing. Dari hasil pengamatan di lapangan setidaknya semua ketua dalam kelompok tersebut telah memiliki sertifikat kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi pelatih pada bidang yang digeluti oleh kelompok tersebut. Dalam hal ini Al Barokah dan Citra Muda merupakan Kelompok Tani yang siap menjadi P4S dengan klasifikasi “Kelas Madya”, yang ditinjau dari kesiapan segala sarana prasarana, tenaga pelatih, jejaring kerja sama, serta komoditas dari kedua Kelompok Tani tersebut yang dapat memenuhi pasar secara berkelanjutan (*continue*). Al Barokah dan Citra Muda dapat dikatakan sebagai Kelompok Tani yang telah lama malang melintang di dunia Pertanian, sehingga dua Kelompok Tani ini layak untuk dijadikan tempat Pelatihan atau P4S serta layak dijadikan tempat percontohan untuk tempat Pelatihan dan permagangan bagi petani milenial guna menciptakan Pengusaha Pertanian Milenial.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan untuk kapasitas fasilitator yang dimiliki sangat memadai. Para Ketua Kelompok Tani merupakan para pakar dibidangnya masing-masing yang sering menjadi pembicara dalam segala kegiatan yang diadakan oleh dinas-dinas terkait dan universitas-universitas yang memiliki fakultas atau jurusan peternakan dan pertanian.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai dimana kesiapan Kelompok Tani dapat bertahan dan menjadikan P4S sesuai dengan harapan dari Permentan Nomor. 33/Permentan/SM.230/7/2016 serta sangat dibutuhkan untuk mencetak generasi milenial di

bidang pertanian, dengan adanya klasifikasi P4S dapat diketahui sejauh mana Kelompok Tani tersebut dapat dijadikan model atau percontohan sebagai tempat permagangan dan pelatihan bagi generasi milenial yang ingin belajar pertanian.

Hasil dari data yang didapat menjelaskan, semua Kelompok Tani yang diklasifikasi layak dan siap untuk dijadikan sebagai P4S dengan skor yang telah didapat, selain itu P4S diminta untuk dapat meningkatkan inovasi untuk menghasilkan produk yang handal serta penguasaan teknologi pertanian. Dari delapan Kelompok Tani yang diidentifikasi terdapat dua kelompok Tani yang merupakan “Kelas Pemula” dan enam Kelompok Tani yang dikategorikan sebagai “Kelas Madya”. Penguasaan teknologi dan produk yang handal menjadi daya tarik tersendiri, tentu saja pada tujuan akhir tidak hanya untuk generasi petani milenial atau mereka yang tertarik dengan pertanian saja yang dilibatkan namun juga mengajak masyarakat untuk mencintai dunia pertanian dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan P4S dan didukung dengan fasilitator yang mumpuni.

Pemantapan Kelompok Tani menjadi P4S dapat dilakukan dengan meningkatkan sarana prasarana, jejaring usaha dan tenaga pelatih. Dalam hal ini tugas Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan UPT di bawahnya serta jajaran Pemerintah Daerah terkait dengan P4S peningkatan kerja sama dan kolaborasi yang efektif di segala aspek dalam perwujudan pertanian yang mandiri, maju dan modern sehingga tercipta generasi petani milenial.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada University Press
- Fitri Nurfatriani. 2015. Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 12 No. 2, Agustus 2015 : 105 – 124.
- Fitri Nurhayati. 2018. Peran Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sebagai Sarana untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Desa Glonggong, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah, Dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Miles, Matthew B & A Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya